



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research  
Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 4197-4207  
E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-42468  
Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Peran Lembaga Independen Dalam Pengawasan Kinerja Pemerintah

Latifah Nurjannah Sartono<sup>1✉</sup>, Yosua Azriel<sup>2</sup>, Dimas Andrianto Kusuma<sup>3</sup>

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Email: [latifahhns@gmail.com](mailto:latifahhns@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Lembaga independen memiliki peran penting dalam pengawasan kinerja pemerintah. Tugas utama lembaga independen adalah untuk memastikan bahwa pemerintah bertindak sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam melakukan tugasnya, lembaga independen harus beroperasi secara independen dan bebas dari pengaruh politik atau kepentingan pribadi. Adapun tujuan penelitian ini adalah menganalisis peran lembaga independen dalam pengawasan kinerja pemerintah. Metode penelitian ini yaitu tinjauan pustaka. Hasil penelitian ini adalah bahwa lembaga independen memiliki peran yang sangat penting dalam pengawasan kinerja pemerintah. Dalam era demokrasi dan transparansi, keberadaan lembaga independen dianggap sebagai bentuk kontrol dan keseimbangan dalam sistem pemerintahan. Dengan adanya lembaga independen, pemerintah akan lebih diawasi dan terhindar dari penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi. Selain itu, lembaga independen juga dapat membantu pemerintah dalam menyusun kebijakan yang lebih baik dan efektif. Dengan adanya lembaga independen yang bekerja secara transparan dan independen, diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kinerja pemerintah.

Kata Kunci : *Lembaga Independen, Kinerja Karyawan, Pengaruh Politik*

## Abstract

The independent institution plays an important role in monitoring the government's performance. The main task of independent institutions is to ensure that the government acts in accordance with established regulations and policies. In performing their duties, independent institutions must operate independently and free from political influence or vested interests. The purpose of this study is to analyse the role of independent institutions in monitoring government performance. This research method is literature review. The result of this study is that independent institutions have a very important role in overseeing government performance. In the era of democracy and transparency, the existence of independent institutions is considered a form of control and balance in the government system. With the existence of independent institutions, the government will be better monitored and avoid abuse of power or corruption. In addition, independent institutions can also assist the government in formulating better and more effective policies. With the existence of independent institutions that work transparently and independently, it is expected to increase the accountability and transparency of government performance.

*Keywords: Independent Institutions, Employee Performance, Political Influence*

## PENDAHULUAN

Pada konteks ketatanegaraan Republik Indonesia, Konstitusi Republik Indonesia menampilkan wajah baru, setelah selesainya empat perubahan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), yang secara berantai dilakukan oleh MPR RI selama empat tahun, sejak 1999 hingga 2002. Salah satu kecenderungan wajah ketatanegaraan Indonesia transisi, serta setelah perubahan UUD 1945 adalah lahirnya lembaga negara independen (*independen agencies*)" maupun lembaga non struktural lainnya, serta komisi eksekutif (Jazuly, 2015).

Sebenarnya kemunculan lembaga-lembaga baru yang bersifat mandiri dan independen tidak hanya dalam konteks negara Indonesia, akan tetapi pada tiga dasarwasa terakhir di abad ke 20 mengalami perkembangan global kelembagaan negara secara pesat (Basarah, 2014).

Kehadiran lembaga negara independen ini pada awalnya dilatarbelakangi oleh krisis kepercayaan terhadap lembaga-lembaga negara yang ada. Krisis kepercayaan ini bukan saja dimonopoli oleh publik secara umum, tetapi juga oleh para elit politik. Krisis kepercayaan ini berawal dari kegagalan lembaga-lembaga negara yang ada dalam menjalankan fungsi-fungsi utamanya atau sebagai akibat dari meluasnya penyimpangan fungsi lembaga-lembaga yang ada selama kurun waktu 32 tahun pada masa Orde Baru (Mochtar, 2016). Hadirnya lembaga negara independen juga karena adanya keterbukaan yang mendorong masifikasi kepentingan dan tuntutan masyarakat sebagai dampak modernisasi sekaligus perubahan sosial politik dalam masyarakat yang selama ini

kurang sekali diintegrasikan secara memadai oleh lembaga-lembaga negara yang tersedia. Perubahan-perubahan sosial politik tersebut juga telah melahirkan pergeseran paradigma dalam melihat perbedaan secara tegas ranah negara dan ranah non-negara yang menjadi skema dasar dan konstruksi argumentasi trias politica (Arliman, 2020).

peran lembaga independen dalam pengawasan kinerja pemerintah berkaitan dengan pentingnya memiliki mekanisme pengawasan yang efektif terhadap kinerja pemerintah dalam menjalankan tugas-tugasnya (Hakim, 2009). Dalam sebuah negara demokratis, pemerintah bertanggung jawab kepada rakyat, sehingga rakyat mempunyai hak untuk mengetahui dan mengawasi tindakan pemerintah. Namun, pengawasan langsung oleh rakyat tidak selalu memungkinkan, sehingga diperlukan lembaga independen yang memiliki peran khusus dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Lembaga independen ini berperan sebagai pengawas atau *watchdog* terhadap kinerja pemerintah, sehingga dapat meminimalisir tindakan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang mungkin terjadi. Selain itu, lembaga independen juga berperan dalam mendorong pemerintah untuk melakukan reformasi dan meningkatkan kinerja sektor publik. Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi, lembaga independen dapat memberikan umpan balik terhadap kinerja pemerintah, sehingga pemerintah dapat melakukan perbaikan atau perubahan kebijakan yang diperlukan (Nurtjahjo, 2005).

Di Indonesia, terdapat beberapa lembaga independen yang memiliki peran dalam pengawasan kinerja pemerintah, antara lain Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ombudsman Republik Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) (Fauzan, 2010). Kehadiran lembaga independen ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan rakyat, sehingga dapat tercipta pemerintahan yang baik dan bersih .

## METODE PENELITIAN

Metode tinjauan pustaka adalah salah satu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi dari sumber-sumber tertulis seperti buku, jurnal, artikel, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian (Sugiyono, 2019). Dalam konteks peran lembaga independen dalam pengawasan kinerja pemerintah, metode tinjauan pustaka dapat digunakan untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang konsep dan teori yang terkait dengan topik tersebut, serta mengevaluasi penelitian dan kajian sebelumnya yang telah dilakukan oleh para ahli. Berikut ini adalah pembahasan mengenai metode tinjauan pustaka dalam konteks peran lembaga independen dalam pengawasan kinerja pemerintah:

## 1. Identifikasi sumber-sumber pustaka

Dalam melakukan tinjauan pustaka, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi sumber-sumber pustaka yang relevan dengan topik penelitian. Sumber-sumber tersebut dapat diperoleh dari berbagai jenis publikasi seperti jurnal, buku, laporan, artikel, dan dokumen resmi pemerintah atau lembaga independen.

## 2. Pengumpulan data

Setelah sumber-sumber pustaka telah diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah mengumpulkan data dari sumber-sumber tersebut. Data yang dikumpulkan dapat berupa informasi tentang konsep dan teori terkait peran lembaga independen dalam pengawasan kinerja pemerintah, serta hasil penelitian dan kajian terbaru yang telah dilakukan oleh para ahli dalam bidang tersebut.

## 3. Analisis Data

Setelah data dikumpulkan, selanjutnya dilakukan analisis data untuk memahami dan mengevaluasi informasi yang telah diperoleh. Dalam analisis data, dapat digunakan teknik-teknik seperti metode kualitatif, deskriptif, atau content analysis untuk memahami dan mengorganisir data secara sistematis.

## 4. Interpretasi hasil

Hasil dari analisis data kemudian diinterpretasikan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai topik penelitian. Hasil interpretasi dapat digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi peran lembaga independen dalam pengawasan kinerja pemerintah, serta memberikan rekomendasi dan solusi yang tepat dalam meningkatkan peran tersebut.

## 5. Penulisan Laporan

Langkah terakhir adalah menulis laporan berdasarkan hasil tinjauan pustaka yang telah dilakukan. Laporan tersebut dapat digunakan sebagai referensi atau dasar untuk melakukan penelitian lanjutan atau sebagai sumber informasi untuk kepentingan lainnya seperti pengambilan keputusan atau perencanaan program dan kebijakan.

Dalam melakukan tinjauan pustaka mengenai peran lembaga independen dalam pengawasan kinerja pemerintah, metode ini sangat berguna untuk mengumpulkan informasi dan pemahaman yang mendalam tentang topik tersebut. Dengan melakukan tinjauan pustaka, peneliti dapat mengevaluasi penelitian dan kajian sebelumnya, mengidentifikasi kekurangan dan kelemahan dalam penelitian tersebut, serta menghasilkan rekomendasi dan solusi yang tepat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Di Indonesia, terdapat beberapa lembaga independen yang memiliki peran penting dalam pengawasan kinerja pemerintah. Beberapa di antaranya adalah:

### 1. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

KPK didirikan pada tahun 2002 sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab dalam memberantas tindak korupsi di Indonesia. KPK memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan penyidikan, penuntutan, dan pencegahan tindak pidana korupsi. KPK juga memiliki fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah dan lembaga negara dalam hal pencegahan dan pemberantasan korupsi.

### 2. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

BPK merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab dalam melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan negara. BPK memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan pemerintah dan lembaga negara, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan pengelolaan keuangan negara.

### 3. Ombudsman Republik Indonesia (ORI)

ORI adalah lembaga independen yang bertugas dalam mengawasi dan menyelesaikan pengaduan masyarakat terkait pelayanan publik yang tidak memuaskan. ORI memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan dan mediasi terhadap pengaduan masyarakat, serta memberikan rekomendasi dan saran kepada lembaga pemerintah terkait peningkatan kualitas pelayanan publik.

### 4. Dewan Pers

Dewan Pers merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab dalam mengawasi kebebasan pers dan menjaga etika jurnalistik di Indonesia. Dewan Pers memiliki tugas dan wewenang untuk memberikan sanksi dan peringatan kepada media yang melanggar kode etik jurnalistik.

### 5. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

Komnas HAM merupakan lembaga independen yang bertugas dalam mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia di Indonesia. Komnas HAM memiliki wewenang untuk melakukan investigasi terhadap pelanggaran hak asasi manusia, memberikan rekomendasi dan saran kepada pemerintah dan lembaga negara terkait peningkatan perlindungan hak asasi manusia.

Dalam menjalankan tugasnya, lembaga independen tersebut dapat memberikan pengawasan terhadap kinerja pemerintah dan lembaga negara dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh lembaga independen, diharapkan dapat tercipta tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat.

Lembaga independen memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Berikut adalah mekanisme kerja yang dilakukan oleh lembaga independen dalam melakukan pengawasan:

#### 1. Monitoring dan Evaluasi Program/ Kebijakan Pemerintah

Lembaga independen melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program dan kebijakan pemerintah untuk mengetahui apakah program dan kebijakan tersebut berhasil mencapai tujuannya dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Mekanisme kerja yang dilakukan dalam hal ini adalah dengan melakukan pengumpulan data dan informasi, serta melakukan analisis dan penilaian atas program/kebijakan yang sedang berlangsung.

#### 2. Pemberian Rekomendasi

Setelah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program/kebijakan pemerintah, lembaga independen memberikan rekomendasi kepada pemerintah agar dapat melakukan perbaikan atau penyempurnaan atas program/kebijakan yang sedang berlangsung. Rekomendasi ini dapat berupa saran, masukan, atau kritik yang konstruktif yang ditujukan kepada pemerintah.

#### 3. Pelaporan

Lembaga independen melakukan pelaporan atas hasil pengawasannya kepada publik dan pemerintah. Pelaporan ini dilakukan secara rutin, baik dalam bentuk laporan tertulis, presentasi, atau dalam bentuk media sosial dan website. Tujuan dari pelaporan ini adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kinerja pemerintah dan memberikan umpan balik kepada pemerintah tentang program dan kebijakan yang telah dilaksanakan.

#### 4. Monitoring Pelaksanaan Anggaran

Lembaga independen juga melakukan monitoring terhadap pelaksanaan anggaran pemerintah untuk memastikan bahwa anggaran tersebut digunakan secara efektif dan efisien. Monitoring ini dilakukan dengan melakukan pengawasan terhadap setiap tahap pelaksanaan anggaran, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi. Mekanisme kerja yang dilakukan dalam hal ini adalah dengan melakukan audit keuangan dan pemeriksaan dokumen-dokumen pelaksanaan anggaran.

Dalam menjalankan mekanisme kerja tersebut, lembaga independen perlu memiliki independensi, kredibilitas, dan kepercayaan dari publik. Hal ini akan memudahkan lembaga independen dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah secara efektif dan efisien.

Peran lembaga independen dalam pengawasan kinerja pemerintah di Indonesia memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintah. Berikut adalah beberapa dampak yang dapat dijelaskan:

### 1. Meningkatkan akuntabilitas pemerintah

Lembaga independen memiliki peran penting dalam meningkatkan akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat. Dengan melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah, lembaga independen dapat memastikan bahwa kebijakan dan program yang dilakukan pemerintah benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Selain itu, lembaga independen juga dapat mengungkapkan kecurangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga dapat menekan tingkat korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik.

### 2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Pengawasan kinerja pemerintah oleh lembaga independen juga dapat berdampak positif terhadap kualitas pelayanan publik. Dengan adanya lembaga independen yang mengawasi kinerja pemerintah, maka pemerintah akan lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hal ini dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, sehingga masyarakat akan lebih terlayani dengan baik dan memperoleh manfaat yang maksimal.

### 3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah

Dalam jangka panjang, peran lembaga independen dalam pengawasan kinerja pemerintah dapat membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ketika masyarakat merasa bahwa pemerintah memiliki kinerja yang baik dan bertanggung jawab, maka mereka akan lebih percaya dan menghargai keberadaan pemerintah sebagai lembaga yang bertugas untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Sebaliknya, jika kinerja pemerintah dipandang buruk dan tidak akuntabel, maka masyarakat akan semakin tidak percaya dan meragukan kemampuan pemerintah dalam memimpin dan memerintah.

Dalam hal ini, dapat disimpulkan bahwa peran lembaga independen dalam pengawasan kinerja pemerintah sangatlah penting untuk memastikan bahwa pemerintah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, serta memenuhi kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, lembaga independen juga dapat membantu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat perlu mendukung dan memfasilitasi kinerja lembaga independen agar dapat bekerja secara optimal dalam menjalankan tugas pengawasan mereka.

Lembaga independen memiliki peran penting dalam menjaga akuntabilitas pemerintah dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau tindakan korupsi. Namun, terkadang terdapat konflik kepentingan antara lembaga independen dan pemerintah dalam melakukan pengawasan kinerja. Konflik kepentingan tersebut dapat muncul karena beberapa faktor, di antaranya adalah:

#### 1. Ketergantungan Keuangan

Lembaga independen membutuhkan dukungan keuangan dari pemerintah atau parlemen untuk menjalankan tugasnya. Namun, ketergantungan keuangan tersebut dapat mengurangi independensi lembaga independen dalam melakukan pengawasan kinerja pemerintah. Pemerintah atau parlemen dapat menggunakan kontrol keuangan untuk membatasi atau mempengaruhi pengawasan yang dilakukan oleh lembaga independen.

## 2. Keterkaitan Politik

Lembaga independen sering kali dibentuk oleh pemerintah atau parlemen, sehingga terdapat keterkaitan politik antara keduanya. Hal ini dapat menyebabkan konflik kepentingan dalam hal pengawasan kinerja pemerintah. Misalnya, lembaga independen dapat merasa terpaksa untuk menutup-nutupi tindakan korupsi atau kegagalan pemerintah agar tidak merusak hubungan politik yang telah terjalin.

## 3. Pengaruh dari Pihak Lain

Selain pemerintah, lembaga independen juga dapat mendapatkan pengaruh dari pihak lain seperti kelompok kepentingan atau sponsor. Pengaruh tersebut dapat mengurangi independensi lembaga independen dalam melakukan pengawasan kinerja pemerintah.

Untuk mengatasi konflik kepentingan antara lembaga independen dan pemerintah, diperlukan beberapa langkah, di antaranya:

### 1. Menjamin Kebebasan Keuangan

Pemerintah atau parlemen perlu memberikan dukungan keuangan yang memadai dan memastikan bahwa lembaga independen tidak tergantung pada pihak lain dalam menjalankan tugasnya. Hal ini dapat meningkatkan independensi lembaga independen dalam melakukan pengawasan kinerja pemerintah.

### 2. Meningkatkan Independensi

Lembaga independen harus diatur dengan undang-undang yang jelas dan memiliki struktur organisasi yang independen dari pemerintah atau kelompok kepentingan lain. Pemilihan anggota lembaga independen harus berdasarkan pada kriteria yang objektif dan kredibel.

### 3. Memperkuat Kepatuhan Hukum

Pemerintah harus memastikan bahwa lembaga independen memiliki kewenangan yang cukup dan mendukung upaya-upaya pengawasan yang dilakukan. Jika ada pelanggaran hukum atau korupsi yang ditemukan oleh lembaga independen, pemerintah harus bertindak sesuai dengan hukum dan tidak menghalangi proses hukum.

Dukungan publik terhadap peran lembaga independen dalam pengawasan kinerja pemerintah sangat penting dalam menjaga integritas dan akuntabilitas pemerintah. Publik yang sadar akan

pentingnya peran lembaga independen dalam menjaga tata kelola pemerintah yang baik akan berkontribusi dalam menciptakan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Namun, tingkat dukungan publik terhadap lembaga independen dapat berbeda-beda antara kelompok masyarakat tertentu. Beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat dukungan publik antara lain:

#### 1. Tingkat Pendidikan

Individu dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung lebih memahami pentingnya peran lembaga independen dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang baik dan berkontribusi dalam meningkatkan dukungan publik.

#### 2. Level Kepercayaan pada Pemerintah

Individu yang merasa tidak percaya pada pemerintah atau menganggap pemerintah tidak menjalankan tugasnya dengan baik cenderung lebih mendukung peran lembaga independen dalam pengawasan kinerja pemerintah.

#### 3. Orientasi Politik

Individu dengan orientasi politik yang berbeda-beda dapat memiliki pandangan yang berbeda mengenai peran lembaga independen dalam pengawasan kinerja pemerintah. Kelompok politik yang berkuasa mungkin kurang mendukung peran lembaga independen dalam pengawasan kinerja pemerintah.

#### 4. Media Sosial

Media sosial dapat mempengaruhi pendapat publik mengenai lembaga independen. Beberapa informasi yang disebarluaskan melalui media sosial dapat memberikan informasi yang salah tentang peran lembaga independen dan dapat mempengaruhi dukungan publik.

Dalam beberapa kasus, terdapat perbedaan pendapat antara kelompok masyarakat tertentu mengenai peran lembaga independen dalam pengawasan kinerja pemerintah. Kelompok masyarakat yang lebih terlibat dalam politik atau kelompok yang lebih berkepentingan dalam kebijakan tertentu mungkin memiliki pendapat yang berbeda mengenai peran lembaga independen dalam pengawasan kinerja pemerintah. Misalnya, kelompok yang memiliki kepentingan ekonomi tertentu mungkin kurang mendukung peran lembaga independen dalam pengawasan kebijakan ekonomi pemerintah.

Oleh karena itu, penting bagi lembaga independen untuk menjalin hubungan yang baik dengan publik dan berkomunikasi secara transparan mengenai peran dan tugasnya dalam menjaga tata kelola pemerintah yang baik. Selain itu, diperlukan juga upaya untuk meningkatkan kesadaran publik mengenai pentingnya peran lembaga independen dalam menjaga integritas dan akuntabilitas pemerintah.

Peran lembaga independen dalam pengawasan kinerja pemerintah dapat berbeda-beda di berbagai negara, tergantung pada sistem politik, sosial, dan budaya yang berlaku di negara tersebut. Beberapa negara mungkin memiliki lembaga independen yang lebih kuat dalam melaksanakan tugasnya, sementara negara lain mungkin mengalami kendala dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga independen. Berikut adalah perbandingan peran lembaga independen di berbagai negara dan pengaruh sistem politik, sosial, dan budaya pada efektivitas pengawasan kinerja pemerintah oleh lembaga independen:

#### 1. Amerika Serikat

Di Amerika Serikat, terdapat banyak lembaga independen seperti *Government Accountability Office (GAO)*, *Office of Inspector General (OIG)*, dan *Federal Reserve System*. Lembaga-lembaga tersebut memiliki peran yang cukup kuat dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Sistem politik yang demokratis dan budaya masyarakat yang menghargai kebebasan informasi dan transparansi sangat mendukung efektivitas lembaga independen di Amerika Serikat.

#### 2. Inggris

Di Inggris, terdapat beberapa lembaga independen seperti *National Audit Office (NAO)*, dan *Office of Budget Responsibility (OBR)*. Namun, lembaga independen di Inggris cenderung lebih bergantung pada dukungan politik dan memiliki keterbatasan dalam menjalankan tugasnya. Sistem politik Inggris yang didasarkan pada sistem parlementer dan budaya masyarakat yang lebih konservatif mungkin mempengaruhi efektivitas lembaga independen di negara ini.

#### 3. Jerman

Di Jerman, lembaga independen seperti *Bundesrechnungshof (BRH)* dan *German Council of Economic Experts* memiliki peran yang cukup kuat dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Sistem politik federal yang kuat dan budaya masyarakat yang menghargai integritas dan akuntabilitas mendukung efektivitas lembaga independen di Jerman.

#### 4. Indonesia

Di Indonesia, terdapat beberapa lembaga independen seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun, lembaga independen di Indonesia masih mengalami kendala dalam menjalankan tugasnya, seperti terbatasnya anggaran dan pengaruh politik yang kuat. Sistem politik yang masih berkembang dan budaya masyarakat yang kurang menghargai integritas dan akuntabilitas mungkin mempengaruhi efektivitas lembaga independen di Indonesia.

Dari perbandingan di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas lembaga independen dalam pengawasan kinerja pemerintah dipengaruhi oleh sistem politik, sosial, dan budaya yang berlaku di negara tersebut. Negara dengan sistem politik yang lebih demokratis dan masyarakat yang lebih

menghargai integritas dan akuntabilitas cenderung memiliki lembaga independen yang lebih efektif dalam melaksanakan tugasnya.

## SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa lembaga independen memiliki peran yang sangat penting dalam pengawasan kinerja pemerintah. Dalam era demokrasi dan transparansi, keberadaan lembaga independen dianggap sebagai bentuk kontrol dan keseimbangan dalam sistem pemerintahan. Dengan adanya lembaga independen, pemerintah akan lebih diawasi dan terhindar dari penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi. Selain itu, lembaga independen juga dapat membantu pemerintah dalam menyusun kebijakan yang lebih baik dan efektif. Namun, peran lembaga independen ini masih sering dipertanyakan oleh beberapa pihak yang menganggap bahwa lembaga ini tidak sepenuhnya independen dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, lembaga independen juga sering dihadapkan pada masalah finansial yang dapat memengaruhi kinerja dan independensinya. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memperkuat independensi dan efektivitas lembaga independen sebagai pengawas kinerja pemerintah.

Dalam hal ini, pemerintah dan masyarakat perlu mendukung dan memperkuat peran lembaga independen dengan memberikan dukungan finansial dan kebijakan yang memungkinkan lembaga independen untuk beroperasi secara independen. Selain itu, lembaga independen juga perlu menjaga kredibilitas dan integritasnya dengan menunjukkan kinerja yang baik dan transparan. Dengan demikian, peran lembaga independen dalam pengawasan kinerja pemerintah dapat terus diperkuat dan dijadikan sebagai kontrol yang efektif dalam sistem pemerintahan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Basarah. Kajian Teoritis Terhadap Auxiliary State`S Organ Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 43. No. 1, (2014). h. 1-2
- Arliman S, Laurensius. (2020). Kedudukan Lembaga Negara Independen Di Indonesia Untuk Mencapai Tujuan Negara Hukum. *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8 No. 7. hlm. 1030-1043
- Jusri, A. P. O., & Maulidha, E. (2020). Peran Dan Kompetensi Auditor Syariah Dalam Menunjang Kinerja Perbankan Syariah. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 4(2), 222-241.
- Hendra Nurtjahjo. Lembaga, Badan, Dan Komisi Negara Independen (State Auxiliary Agencies) Di Indonesia, *Jurnal Hukum & Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Vol. 35. No. 3, (2005). h. 280.

- Kaldera, N. X., Aulia, M., & Faza, H. A. (2020). Peran BPK Sebagai Lembaga Pengawas Eksternal Pengelolaan Keuangan Negara. *Jurnal Fundamental Justice*, 13-26.
- Lukman Hakim. Pelembagaan Komisi-Komisi Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. *Jurnal Konstitusi Puskasi Fakultas Hukum Universitas Widyagama Malang*, Vol. 2, No. 2. (2009). h. 15.
- Muhammad Fauzan. Eksistensi Komisi Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia (Studi Terhadap Komisi Perlindungan Anak Indonesia). *Jurnal Media Hukum*, Vol. 17, No. 2. (2010).
- Sugiyono (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syukron Jazuly. Independent Agencies dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia, *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 4, No. 1, (2015). h. 222-223.
- Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen, Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi*, Rajawali Press, Jakarta, 2016, h. 114-132.